

ANALISIS POTENSI EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI SULAWESI TENGAH

**Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan**



**TESIS
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2**

**Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan**

**Oleh
Nudiatulhuda Mangun
C4B 005 115**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

**Mei
2007**

ABSTRACT

This study of background overshadow by existence of pre-eminent economic potency phenomenon and also area classification of regency/Town in Province of Central Sulawesi not yet been identified to be exploited in an optimal for the development of development. Aim to know and analyse bases sector/pre-eminent, which have competitiveness of competitive and specialization each regency/town, determining typology area and bases sector priority utilize development of development of Regency / Town in Province of Central Sulawesi.

Used data in this research is data of secondary range of time in 2000 -2005 stemming from BPS Province of Central Sulawesi, BPS Regency / Town in Province of Central Sulawesi, and also Bapeda Province of Central Sulawesi. Analysis model that used each Analysis of LQ, Shift-Share, Typology Klassen and also MRP.

The result of this research conclude that Agricultural Sector still represent dominant bases sector because its 9 regency have bases / pre-eminent in this sector; Processing industrial sector 6 regency; Sector of Trade, Hotel,Restorant 4 regency; Sector Transportation, Telecommunication; Sector of Finances, Rental, Company Service 3 regency; Sector of Electric, Gas, Clean Water; Building Sector and Services Sector 2 regency; while mining sector and Processing industry only owned by Palu Town at the same time as town which at most owning bases sector (8 bases sector)

No one Regency / Town which enter first criterion namely notation of overly third of component have positive sign (+++), on the contrary there are 4 Regency owning economic sector which have negative notation to third component (---) with same sector. That way also result of analysis of Shift-Share indicate that there aren't sector having excellence of competitive in all Regency/Town in Province of Central Sulawesi, but owning specialization. Sector of Electric,Gas, Clean Water and Sector of Trade, Hotel, Restaurant and Services sector have specialization in 6 Regency / Town; Processing Industrial sector; Transportation, Communication and sector of Finance, Rental and Company Service 5 Regency / Town; Agricultural Sector; Mining Digging Sector 4 Regency/Town.

Determination of Area Typology there no Regency/Town enter area Typologi quickly go forward and grow and area Typology expand quickly. Three Regency/Town enter area Typology go forward but depress and 7 Regency enter Typology left behind area. From result of analysis of LQ, Shift-Share, area Typology and Sectoral growth, can be determined by Regency/Town becoming priority development of pre-eminent sectors which owned. Regency of Tojo Una-Una have first priority for the development of region all bases sector.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di negara-negara berkembang pada umumnya, terfokus pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur antara lain melalui Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah baik Propinsi, Kabupaten maupun Kota.

Pelaksanaan pembangunan Indonesia selama ini juga tidak terlepas dari pandangan tersebut. Pembangunan nasional mempunyai dampak atas pembangunan daerah, sebab daerah adalah bagian integral dari suatu negara. Indonesia sebagai suatu negara kesatuan, rencana pembangunannya meliputi rencana pembangunan nasional maupun rencana pembangunan dalam tataran regional. Pembangunan ekonomi nasional mempunyai dampak atas struktur ekonomi nasional dan struktur ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan (Soeparmoko, 2002). Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisien. Dalam penentuan kebijakan, haruslah

memperhitungkan kondisi internal maupun perkembangan eksternal. Perbedaan kondisi internal dan eksternal hanyalah pada jangkauan wilayah, dimana kondisi internal meliputi wilayah daerah/regional, sedangkan kondisi eksternal meliputi wilayah nasional. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah akan bertanggung jawab secara lebih penuh terhadap kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana, kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumberdaya manusia.

Sejak era reformasi tahun 1999 terjadi pergeseran paradigma dalam sistim penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi atau disebut Otonomi daerah yang mengandung makna, beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah (Armida, 2000). Hal ini membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain dibidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut .

John Glasson (1990) mengatakan bahwa kemakmuran suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonominya dan faktor ini merupakan faktor utama. Perubahan wilayah kepada kondisi yang lebih makmur tergantung pada usaha-usaha di daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa, serta usaha-usaha pembangunan yang diperlukan. Oleh sebab itu maka kegiatan basis mempunyai peranan penggerak utama (*prime mover role*) dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional. Berdasarkan teori basis ekonomi, faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad,1999). Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*). Dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat karena disetiap daerah mempunyai keadaan yang berbeda, mempunyai karakteristik tersendiri, laju pertumbuhan ekonomi maupun potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Daerah Sulawesi Tengah sebagai salah satu propinsi yang ada di pulau Sulawesi, merupakan propinsi terbesar di pulau Sulawesi ditinjau dari segi luas wilayah, Sulawesi Tengah mempunyai luas wilayah sebesar 63.678 km² sedangkan propinsi Sulawesi Selatan hanya sebesar 62.365 km², Propinsi Sulawesi Utara mempunyai luas wilayah sebesar 15.273 km² dan Propinsi Sulawesi Tenggara sebesar 38.140 km². Namun demikian dengan luas wilayah yang relatif besar serta jumlah penduduk yang tidak berbeda jauh dengan propinsi lain di Sulawesi yaitu jumlah penduduk sebesar 2.221 jiwa

diatas Propinsi Sulawesi Utara sebanyak 2.136 jiwa dan Sulawesi Tenggara sebanyak 1.887 jiwa, seperti terlihat dalam Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1.
Perbandingan luas wilayah dan jumlah penduduk
Provinsi se Sulawesi Tahun 2003

No.	Wilayah	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Sulawesi Tengah	63.678	2.221
2.	Sulawesi Selatan	62.365	8.253
3.	Sulawesi Tenggara	38.140	1.887
4.	Sulawesi Utara	15.273	2.136

Sumber data : BPS – Statistik Indonesia 2003

Propinsi Sulawesi Tengah mempunyai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang relatif rendah yakni hanya sebesar Rp. 2.287.380, pada tahun 1999 dan tahun 2003 sebesar Rp.2.643.128,- atau berada diurutan 3 atau dibawah Propinsi Sulawesi Selatan dengan PDRBnya sebesar Rp. 11.092.996,- tahun 2003 dan Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 3.490.692,- pada tahun 2003. Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sebesar 4,14 % sama dengan Propinsi Sulawesi Tenggara dan berada diatas Propinsi lainnya, tidak termasuk Gorontalo dan Sulawesi Barat yang baru dimekarkan, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Perbandingan PDRB , PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan ekonomi
Propinsi se Sulawesi tahun 1999 dan 2003 atas dasar harga konstan 1993

No	Wilayah	PDRB Thn 1999 (juta Rp)	PDRB Thn.2003 (juta Rp)	PDRB/kap Thn.2003 (juta Rp)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Sulawesi Utara	3.889.665	3.490.692	6.102,2	2,74
2.	Sulawesi Tengah	2.287.380	2.643.128	5.257,4	4,14
3.	Sulawesi Selatan	9.631.076	11.092.996	4.772,0	3,47
4.	Sulawesi Tenggara	1.588.457	1.880970	4.461,9	4,14

Sumber Data : BPS- Statistik Indonesia 2003

Pada sisi lain selang waktu tahun 2003 sampai tahun 2005 Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun proyek Penanaman Modal Asing (PMA) yang disetujui Pemerintah menurut sektor ekonomi sangat kecil jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada tahun 2003 hanya mendapatkan 1 proyek untuk PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp.217,7 milyar, sedangkan untuk provinsi lain; Sulawesi Selatan sebanyak 9, Sulawesi Tenggara 3 dan Sulawesi Utara sebanyak 4 proyek untuk PMDN dengan nilai investasi masing-masing sebesar Rp.29.239,8 milyar Rp. 167,2 milyar dan Rp.142,15 milyar, untuk proyek PMA ditahun 2003 sampai 2005 tidak mendapatkan proyek, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Proyek-Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Proyek-Proyek Penanaman
Modal Asing PMA Yang Disetujui Pemerintah Menurut sektor Ekonomi
(Miliar rupiah)

Provinsi di Sulawesi	2003		2004		2005		
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	
Sultra:	PMDN	4	143.3	3	374.5	2	440.0
	PMA	9	49.9	6	50.0	8	16.5
Tengah:	PMDN	1	217.7	2	1.179.4	0	75.0
	PMA	-	131.4	-	0.5	-	0.0
Tenggara:	PMDN	3	167.2	7	646.1	2	711.8
	PMA	10	210.1	1	1.0	1	34.2
Selatan:	PMDN	9	29.239.8	1	393.0	-	0.0
	PMA	-	-	8	226.1	1	2.9
Gorontalo:	PMDN	-	-	1	0.7	-	0.0
	PMA	1	0.1	2	85.6	1	0.1

Sumber:- BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

- Ada angka proyek tanpa investasi = Proyek Pertambangan (kontrak karya), sebaliknya ada angka investasi tanpa proyek = perluasan proyek

Selanjutnya Tabel 1.4 memperlihatkan volume ekspor menurut pelabuhan penting di Sulawesi. Tabel tersebut terlihat bahwa sejak tahun 2003–2004 Sulawesi Tengah dengan pelabuhannya Pantoloan volume ekspornya hanya sebesar 97,4–111,0 ribu meter ton dibandingkan dengan pelabuhan Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) 448,7-418,9 ribu meter ton, Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara) 406,4–501,0 ribu meter ton dan Pelabuhan Pomala (Sulawesi Tenggara) sebesar 648,2 – 621,5 ribu meter ton.

Tabel 1.4
Volume Ekspor (berat bersih: ribu m.ton) menurut Pelabuhan
Pelabuhan Penting 2003–2004

Pelabuhan di Sulawesi	2003	2004
Sulawesi Selatan : U.Pandang Malili	448.7	418.9
	31.3	105.5
Sulawesi Tenggara : Pomala'a	648.2	621.5
Sulawesi Tengah : Pantoloan	97.4	110.0
Sulawesi Utara : Bitung	406.4	501.0

Sumber: Statistik Indonesia 2004

Sebuah hasil studi tentang posisi perekonomian Propinsi Kawasan Timur Indonesia menurut tipologi daerah (Mudrajat, 2004) menunjukkan bahwa Propinsi Sulawesi Tengah termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal, sedangkan daerah atau Propinsi lain di Sulawesi yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara berada pada klasifikasi Daerah Berkembang Cepat. Padahal potensi yang dimiliki Propinsi Sulawesi Tengah sangat baik dan dapat dibanggakan khususnya disektor kehutanan dengan berbagai jenis kayu utamanya kayu hitam (*ebony timber*) dan sektor perkebunan yang merupakan komoditi perdagangan dan mempunyai peranan strategis, karena disamping merupakan sumber penghasilan devisa negara, juga mencakup usaha kegiatan produksinya yang dapat membuka lapangan kerja yang luas. Sektor perkebunan yang terdiri dari perkebunan besar dengan tujuh komoditi yang mempunyai luas areal sebesar 55.160 ha dengan 88,40 persen diantaranya untuk tanaman kelapa sawit dan tanaman coklat 8,50 persen sedangkan perkebunan rakyat terdiri dari enam belas komoditi dengan luas areal sebesar 478.604 ha tahun 2004 (BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka 2004). Gambaran potensi kehutanan yaitu luas hutan serta fungsinya di Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam Tabel 1.5 sebagai berikut :

Tabel 1.5
Luas Hutan Menurut Kabupaten/Kota
di Propinsi Sulawesi Tengah dan Fungsinya
Tahun 2004 (ha)

Kabupaten/ Kota	Hutan Lindung	Hutan Produksi Biasa Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Hutan yg.dapat dikonversi	Hutan Suaka Alam dan Wisata	Luas Kawasan Hutan
Kab.Banggai Kepulauan	51.336	38.291	49.691	19.351	-	158.669
Kab. Banggai	169.669	55.526	309.113	52.529	23.726	610.563
Kab. Morowali	436.756	181.366	238.177	61.216	241.331	1.158.846
Kab.Poso	299.170	79.142	271.749	34.157	145.452	829.670
Kab. Donggala	232.995	11.624	294.427	33.296	135.736	708.078
Kab. Tolitoli	55.955	39.999	80.644	1.208	53.698	231.504
Kab. Buol	63.602	60.413	100.341	24.070	9.802	258.228
Kab. Parimo	162.640	22.467	127.607	22.808	60.714	396.236
Kab. Tojo Una- Una	10.659	11.759	193	3.221	-	25.832
Kota Palu	7.141	-	4.376	-	5.789	17.306
Sulawesi Tengah	1.489.923	500.589	1.476.316	251.856	676.248	4.394.932

Sumber : Dinas Kehutanan Prop.Sulawesi Tengah
 (BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka 2004)

Konflik sosial pecah di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah pada tahun 1998 dan berkelanjutan hingga tahun 2004. Seiring dengan terjadinya konflik di daerah tersebut jelas mempengaruhi Sulawesi Tengah secara keseluruhan. Indonesia pun dilanda krisis ekonomi dan politik yang mengusung reformasi demokrasi dan ekonomi serta desentralisasi. Ini memiliki implikasi yang besar terhadap ekonomi lokal serta tingkat kesejahteraan masyarakat, karena konflik dapat menimbulkan dampak langsung berupa kematian, kerugian properti dan aset lainnya dan dampak tidak langsung yang

berat serta luas terhadap produksi ekonomi dan perniagaan serta pelayanan (Nudiatulhuda, 2000). Hal ini jelas memperparah kondisi ekonomi daerah meskipun saat ini Sulawesi Tengah berada dalam taraf pemulihan dari adanya konflik yang berkepanjangan. tersebut.

Guna meningkatkan pendapatan daerah pada dewasa ini masing-masing daerah dituntut harus mampu berusaha sendiri untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalan potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi yang tepat adalah jalan terbaik, karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah maka pengembangan pembangunan dan pendapatan daerah tidak akan mencapai hasil yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber kehidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko, 2002).

Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 9 Kabupaten dan 1 Kota dimana tentunya setiap Kabupaten dan Kota masing-masing mempunyai potensi ekonomi yang khas sesuai keadaan daerahnya masing-masing sehingga akan mempunyai PDRB, tingkat pertumbuhan dan prioritas sektoral yang berbeda-beda pula seperti yang terlihat dalam Tabel 1.6. berikut ini.

Tabel 1.6.
PDRB Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah
Atas Dasar Harga Konstan 2000

No	Kabupaten/Kota	PDRB tahun 2000 (Juta Rp)	Persen tase (%)	PDRB Tahun 2004 (juta Rp)	Persen tase (%)	Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata (%)
1.	Kab. Banggai Kepulauan	366.111	4,42	500.313	4,27	6,05
2.	Kab. Banggai	901.545	10,87	1.337.881	11,41	7,55
3.	Kab. Morowali	708.750	8,55	1.021.431	8,71	7,05
4.	Kab. Poso	909.640	10,97	764.782	6,52	3,53
5.	Kab. Donggala	1.688.438	20,37	2.240.776	19,10	5,50
6.	Kab. Toli-Toli	614.642	7,42	922.306	7,86	7,80
7.	Kab. B u o l	305.153	3,68	445.448	3,80	7,29
8.	Kota P a l u	1.576.266	19,02	2.076.360	17,70	5,36
9.	Kab. Tojo Una-Una *)	-	-	344.541	2,94	4,91
10.	Kab. Parimo	1.217.819	14,69	1.914.127	16,32	8,65
	Sulawesi Tengah	8.288.364	100	11.728.617	100	9,35

Sumber Data : BPS - Sulawesi Tengah Dalam Angka 2005

*) Kabupaten Tojo Una-Una dimekarkan Tahun 2002

Tabel diatas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota tahun 2000–2004 terdapat 2 kabupaten yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi rendah dibandingkan kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una masing-masing sebesar 3,53 % dan 4,91 % .

Hal ini memerlukan perhatian yang cukup serius dari pemerintah meskipun diketahui bahwa untuk kabupaten Poso kemunduran ekonominya lebih dipengaruhi oleh adanya konflik sosial yang bernuansa SARA yang berkepanjangan dan untuk Kabupaten Tojo Una-Una baru saja dimekarkan pada akhir tahun 2002 dari kabupaten induknya Poso. Jadi Kabupaten Poso kurun waktu tahun 2000 – 2002 terjadi pemekaran wilayahnya menjadi Kabupaten Morowali serta Kabupaten Tojo Una-Una, untuk itu

perhatian dan pengembangan pembangunannya perlu direncanakan kembali sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Bagi Kabupaten lain meskipun mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang positif, untuk lebih meningkatkan PDRB agar hasilnya optimum diperlukan pemilihan sektor-sektor yang diprioritaskan sehingga dapat menggunakan potensi ekonomi daerah secara optimal terutama bagi daerah-daerah yang potensi dimilikinya belum dimanfaatkan secara baik. Sektor-sektor yang dapat diunggulkan oleh setiap daerah merupakan sektor basis, punya keunggulan kompetitif serta mempunyai spesialisasi bagi daerah yang bersangkutan.

Kajian mengenai potensi ekonomi berupa sektor-sektor unggulan ini sangat diperlukan untuk perencanaan pengembangan pembangunan yang akan datang terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana terjadinya pemekaran wilayah yang berdampak pada berubahnya potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh wilayah asalnya (wilayah induk).

Dari uraian diatas maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui potensi serta identifikasi sektor-sektor ekonomi daerah Kabupaten dan Kota yang berada dalam wilayah Sulawesi Tengah sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di era otonomi daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Propinsi Sulawesi Tengah termasuk daerah yang perekonomiannya lebih rendah dibandingkan dengan tiga Propinsi lain yang setara di Sulawesi yakni Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan meskipun lebih unggul sedikit dari Sulawesi Tenggara, yang tercermin dari tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)nya (lihat tabel 1.2). Demikian pula dengan volume ekspornya serta realisasi proyek-proyek baik Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) yang relatif sedikit dibandingkan dengan Propinsi lain di Sulawesi. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan potensi daerah. Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan dikaji adalah :

1. Ditiap kabupaten dan kota di Propinsi Sulawesi Tengah sektor mana yang mempunyai potensi sebagai sektor basis serta yang mempunyai keunggulan kompetitif atau daya saing dan spesialisasi dengan bantuan alat analisis LQ dan shift – share serta Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
2. Daerah mana yang dapat digunakan untuk memacu pengembangan pembangunan dengan memanfaatkan alat analisis Tipologi Klassen.
3. Bagaimana penentuan prioritas sektor basis untuk pengembangan pembangunan di Sulawesi Tengah ditiap Kabupaten/kota.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi dan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tengah dengan cara :

1. Mengetahui sektor-sektor basis/unggulan di tiap Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah
2. Mengidentifikasi dan menganalisis kinerja sektor-sektor ekonomi di masing-masing daerah terutama untuk mengetahui sektor-sektor yang mempunyai daya saing kompetitif dan spesialisasi
3. Menganalisis tipologi masing-masing daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya.
4. Menentukan prioritas sektor basis guna pengembangan pembangunan di Sulawesi Tengah umumnya serta Kabupaten dan Kota khususnya.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi, informasi dan pedoman bagi pengambil kebijakan serta peneliti lainnya yang berminat dibidang ini:

1. Memudahkan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah membuat perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan potensi ekonomi dan tipologi yang dimiliki tiap Kabupaten/Kota
2. Sebagai bahan informasi untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Sulawesi Tengah tentang kinerja masing-masing sektor.
3. Menambah referensi tentang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan studi-studi selanjutnya.

